

Praktisi Hukum

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

kan dasar bagi penegak hukum untuk menyelidikinya," ucap Askun kepada KBE, Selasa (04/2/20).

Dikatakannya, untuk penyelenggaraan try out tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran cukup besar, buat jasa si penyedia server, sementara yang seharusnya sebagai penanggungjawab kegiatan tersebut Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Supandi malah kebingungan harus berbuat apa.

"Yang saya heran, itu kok Kabid SMP, malah berstatement merasa bingung dan

harus berkoordinasi dengan siapa?, Kalau dia saja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bingung harus berkoordinasi dengan siapa, apa lagi masyarakat atau orang tua siswa terkait nasib anak-anaknya yang akan mengikuti try out ujian itu?" ucapnya.

Lanjut Askun, sebagai orang yang paling bertanggungjawab dengan kegiatan tersebut seharusnya Kabid SMP Disdikpora bisa berhubungan langsung dengan penyedia jasa.

"Ya tegur dong! Bila perlu marahi tuh penyedia jasanya, mahal-mahal anggaran yang di gelontorkan dari

dana BOS yang notabene bersumber dari uang Negara. Tapi kualitas servernya malah membuat kecewa alias tidak profesional," tegasnya.

Masih kata Askun, dirinya menyayangkan pihak Disdikpora yang dinilai sembarangan dalam menentukan penyedia jasa atau penyelenggara try out tersebut.

"Bagaimana nasib para siswa peserta try out tersebut? Kepada semua pihak, baik itu Disdikpora, para Kepala Sekolah sampai dengan penyedia jasa agar tidak main-main dengan persoalan yang berhubungan dengan nasib pendidikan anak bangsa," tegasnya. **(gie)**